

Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Guna Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia Melalui Sosialisasi Migrasi Aman

Putri Diah Lokahita¹, Irzam Ghivar Kawarizmi², Audy Septia Adriana³, Y.A Wahyudin⁴, Valencia Husni⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Mataram

putridiahlokahita1@gmail.com

ABSTRAK

Pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan oleh kelompok Muda Mengabdi di Desa Tanak Beak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat memiliki tujuan utama guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama bagi kelompok Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui rangkaian sosialisasi migrasi aman. Agenda pengabdian ini berfokus terhadap pengkajian isu-isu berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh PMI, terutama dalam pelaksanaan prosedur serta faktor-faktor penghambat dari proses migrasi dengan mengundang Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) sebagai pihak dari pemerintah. Penerapan metode yang digunakan untuk menyalurkan informasi kepada masyarakat melalui mekanisme penyuluhan interaktif, diskusi kelompok, serta simulasi kasus yang melibatkan masyarakat, khususnya PMI di Desa Tanak Beak. Hasil temuan dari penyelenggaraan sosialisasi menunjukkan bahwa meskipun Tanak Beak merupakan salah satu desa dengan angka pengirim PMI yang relatif tinggi, akan tetapi dalam beberapa kasus sebagian besar masyarakat masih kurang mengetahui informasi dan edukasi mengenai prosedur yang resmi sehingga jalur ilegal tanpa adanya pengawasan dari pemerintah tetap diminati. Meninjau dari berbagai persoalan seputar PMI tersebut, orientasi dari kegiatan pengabdian ini berupaya untuk meminimalisir sekaligus mengatasi risiko eksploitasi pekerja migran. Pengabdian ini berperan penting sebagai upaya penegakan hak-hak PMI demi meningkatkan kesejahteraan serta pengembangan kualitas hidup masyarakat Desa Tanak Beak.

Kata kunci : Kesejahteraan, Pekerja Migran Indonesia, Pengabdian, Sosialisasi.

ABSTRACT

The community service that has been carried out by the Muda Mengabdi group in Tanak Beak Village, Narmada District, West Lombok Regency has the main objective of improving community welfare, especially for groups of Indonesian Migrant Workers or known as PMI through a series of safe migration socialization. This service agenda focuses on assessing issues related to the problems faced by PMI, especially in the implementation of procedures and inhibiting factors of the migration process by inviting the Indonesian Migrant Workers Protection Service Center (BP3MI) as the government party. The application of methods used to spread information to the community through interactive counseling mechanisms, group discussions, and case simulations involving the community, especially migrant workers in Tanak Beak Village. The findings of the socialization showed that although Tanak Beak is one of the villages with a relatively high number of PMI senders, in some cases most people still lack information and education regarding legal procedures so that illegal routes without any supervision from the government are still in demand. Reviewing the various issues surrounding PMI, the orientation of this service activity seeks to minimize and overcome the risk of exploitation of migrant workers. This service plays an important role as an effort to enforce the rights of PMI in order to improve the welfare and development the quality of life of the Tanak Beak Village community.

Keywords: *Indonesian Migrant Workers, Service, Socialization, Welfare*

Pendahuluan

Pekerja Migran Indonesia (PMI) telah lama menjadi salah satu elemen penting dalam perekonomian nasional, dengan kontribusi remitansi yang signifikan terhadap devisa negara. Pada tahun 2023, Bank Indonesia mencatat bahwa remitansi yang dikirim oleh PMI mencapai USD 14,22 miliar. Angka ini tidak hanya mencerminkan besarnya potensi ekonomi yang dihasilkan oleh para pekerja migran, tetapi juga menggarisbawahi peran krusial mereka dalam mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Namun, di balik kontribusi ekonomi yang substansial ini, terdapat serangkaian permasalahan kompleks yang dihadapi oleh para PMI, dan hal ini tentu saja perlu diperhatikan untuk menyusun agenda penanganan dari berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam mobilisasi PMI.

Salah satu permasalahan utama yang masih menjadi tantangan dalam proses migrasi adalah tingginya angka PMI ilegal yang berangkat ke luar negeri tanpa melalui prosedur resmi yang ditetapkan pemerintah. Berdasarkan data laporan dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pada periode Januari sampai dengan Desember 2023 telah tercatat sebanyak 274.965 penempatan PMI. Meskipun sepanjang tahun 2023, penempatan PMI melalui prosedur yang resmi telah mengalami kemajuan, namun jumlah PMI ilegal diperkirakan masih sangat signifikan, bahkan mungkin melebihi angka tersebut. Ketidakpastian jumlah PMI ilegal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam upaya perlindungan dan pengawasan, serta menciptakan celah bagi terjadinya berbagai bentuk eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia (Widodo & Belgradoputra, 2019).

PMI yang berangkat melalui jalur ilegal menghadapi risiko yang jauh lebih besar karena cenderung lebih rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi, mulai dari pelanggaran hak-hak dasar sebagai pekerja, kondisi kerja yang tidak layak, hingga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Selain itu, tidak adanya bukti dokumen resmi dan perlindungan hukum membuat PMI ilegal semakin sulit untuk mengakses layanan dasar dan bantuan ketika menghadapi masalah di negara tujuan. Sulitnya akses terhadap informasi yang akurat juga menjadi hambatan bagi para PMI ilegal dalam merencanakan langkah-langkah yang aman dan efektif untuk mencapai tujuan mereka, sehingga sering kali mereka terjebak dalam jaringan penipuan atau pelanggaran hukum.

Menghadapi situasi ini, kelompok pengabdian masyarakat Muda Mengabdi hadir sebagai inisiatif yang bertujuan untuk mengurangi angka PMI ilegal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, khususnya di daerah-daerah kantong pengirim PMI. Program-program yang dirancang telah disesuaikan dengan kebutuhan kolektif warga desa. Melalui kegiatan Proyek Membangun Desa, Muda Mengabdi berupaya untuk meminimalisir permasalahan seputar PMI di desa sekaligus meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Salah satu kegiatan utama dalam program Muda Mengabdi adalah pelaksanaan sosialisasi migrasi aman, yang dirancang untuk memberikan edukasi komprehensif kepada masyarakat desa tentang prosedur legal menjadi PMI dan hak-hak yang mereka miliki.

Desa Tanak Beak, yang terletak di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menjadi lokasi pelaksanaan pengabdian Muda Mengabdi pada tahun 2024. Desa ini dipilih karena merupakan salah satu daerah pengirim PMI dengan angka

yang relatif tinggi. Provinsi NTB sendiri dikenal sebagai salah satu kantong PMI terbesar di Indonesia, dengan ribuan warganya bekerja di luar negeri setiap tahunnya. Namun, temuan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan informasi yang signifikan di kalangan masyarakat Desa Tanak Beak mengenai prosedur resmi untuk menjadi PMI. Berdasarkan informasi hasil wawancara langsung dengan pemerintah desa, persoalan jalur pemberangkatan PMI telah menjadi hambatan dalam pendataan yang terorganisir, sehingga menyebabkan sulitnya pemantauan dan pengawasan terhadap para PMI yang berangkat secara ilegal.

Program kerja Muda Mengabdi di Desa Tanak Beak diawali dengan tahap persiapan yang melibatkan koordinasi intensif dengan pemerintah desa dan diskusi dengan warga desa yang menjadi Purna-PMI. Tim Muda Mengabdi melakukan pemetaan awal untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik masyarakat terkait informasi tentang migrasi aman dan prosedur menjadi PMI legal. Berdasarkan hasil pemetaan ini kemudian menghasilkan serangkaian kegiatan sosialisasi yang disesuaikan dengan lingkungan setempat. Selain sosialisasi, program Muda Mengabdi juga melaksanakan kegiatan pendukung seperti pembuatan media informasi berupa poster dan brosur tentang migrasi aman yang disebarakan kepada warga di setiap dusun. Dalam rangka memperluas jangkauan informasi, Muda Mengabdi juga memanfaatkan platform digital, seperti media sosial dan website, untuk menyebarkan materi edukasi.

Pelaksanaan sosialisasi migrasi aman bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pada kalangan masyarakat terkait regulasi yang mengatur prosedur sirkulasi PMI. Seperti yang tercantum dalam kerangka perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam undang-undang ini, substansinya mencakup perlindungan mulai dari pra-penempatan, selama penempatan, hingga purna-penempatan. Dalam konteks ini, kelompok Muda Mengabdi mengusung tema pemberdayaan terhadap PMI sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan program sosialisasi migrasi aman (Junaidi & Khikmah, 2024). Sosialisasi ini menjadi upaya strategis untuk menyalurkan informasi mengenai hak-hak PMI dan mendorong masyarakat yang sebelumnya mayoritas menggunakan jalur keberangkatan yang ilegal kemudian beralih ke pemilihan jalur migrasi yang legal. Informasi yang terkandung dalam sosialisasi ini tidak hanya berorientasi untuk mengurangi tingkat resiko eksploitasi, tetapi juga menjadi upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemaparan informasi mengenai berbagai program pemerintah yang tentunya akan menjamin pekerjaan yang lebih aman, penghasilan yang layak, dan akses terhadap jaminan sosial.

Program ini tidak hanya merespons kebutuhan akan informasi yang akurat dan terpercaya mengenai prosedur migrasi legal, tetapi juga menjembatani kesenjangan antara kebijakan nasional dan realitas di tingkat desa. Dengan memadukan elemen edukasi, pemberdayaan masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi, inisiatif ini berpotensi menjadi katalis perubahan signifikan dalam pola migrasi tenaga kerja dari daerah-daerah di Lombok. Keberhasilan inisiatif ini di Desa Tanak Beak dapat menjadi model bagi daerah-daerah lain dengan karakteristik serupa, sehingga pada akhirnya dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Dengan demikian, sosialisasi migrasi aman bukan

sekedar program informatif, melainkan menjadi langkah awal dalam mewujudkan visi kesejahteraan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat desa (Febrianti & Afifah, 2023).

Metode Pelaksanaan

Dalam upaya mewujudkan migrasi aman di Desa Tanak Beak Narmada, Tim Proyek Membangun Desa Muda Mengabdi meluncurkan serangkaian program untuk memberikan solusi atas keresahan warga terkait Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berangkat melalui jalur ilegal. Salah satu program utama yang dihadirkan adalah sosialisasi "Migrasi Aman", yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan informasi yang tepat kepada masyarakat.

Metode Pelaksanaan Kegiatan menggunakan pendekatan utama yakni sosialisasi kepada masyarakat guna memberikan pemahaman serta edukasi secara merata kepada para kelompok Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dalam konteks ini, sosialisasi berfungsi sebagai jembatan komunikasi yang menghubungkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan para pekerja migran itu sendiri.

Sosialisasi dilakukan melalui serangkaian kegiatan seperti pemaparan materi, diskusi, serta dialog terbuka. Kegiatan-kegiatan ini dirancang untuk memberikan informasi yang komprehensif mengenai hak dan kewajiban, serta berbagai aspek lain yang berkaitan dengan keresahan yang dialami para pekerja migran. Dengan melibatkan narasumber yang kompeten.

Hasil Kegiatan dan Pembahasan

Permasalahan mengenai Pekerja Migran Indonesia (PMI) telah menjadi salah satu fokus yang berdampak signifikan secara nasional. Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau yang sebelumnya lebih dikenal dengan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) memiliki peranan sangat penting dalam kehidupan masyarakat baik secara lokal maupun nasional, terutama bagi aspek perekonomian. Konsepsi pekerja migran Indonesia dapat dipahami sebagai suatu individu yang memilih untuk bekerja secara aktif dan berkelanjutan dengan melalui proses migrasi atau berpindah di luar wilayah negara tempatnya berasal. Migrasi dapat dipahami sebagai sebuah fenomena perpindahan individu atau kelompok secara lintas batas, yaitu dengan kata lain adanya sirkulasi mobilitas antar negara yang melibatkan kelompok pekerja, sehingga disebut sebagai pekerja migran Indonesia.

1. Pemetaan dan Identifikasi Masalah PMI

Eksistensi Pekerja Migran Indonesia (PMI) telah menjadi isu pembahasan yang sangat masif secara nasional. Tingginya dampak ekonomi yang mampu dihasilkan menyebabkan adanya peningkatan jumlah pekerja migran secara nasional. Bahkan, setiap tahunnya cenderung selalu mengalami peningkatan dengan jumlah yang terbilang besar. Salah satu daerah yang tidak luput dari tingginya angka permintaan pekerja migran yaitu di Pulau Lombok. Menurut berbagai sumber menyatakan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat terutama Pulau Lombok memiliki peran yang krusial dalam melonjaknya pertumbuhan pekerja migran. Meninjau dari permasalahan tersebut, kelompok Muda Mengabdi menyadari bahwa dengan adanya peningkatan jumlah pekerja migran Indonesia di Lombok, diperlukan adanya upaya yang nyata bagi masyarakat lokal terutama

kelompok Pekerja Migran Indonesia (PMI) guna memajukan Sumber Daya Manusia (SDM) di Lombok terutama bagi kelompok migran.

Berangkat dari permasalahan dan fenomena tersebut, kelompok Muda Mengabdi dapat dianggap telah berhasil mengidentifikasi kebutuhan masyarakat lokal. Demi memperoleh data yang nyata, Muda Mengabdi mengharuskan para anggotanya untuk mencapai kepentingan bersama sebagai pihak yang melaksanakan program. Sebagai pengetahuan, bahwa kelompok Muda Mengabdi telah merancang tahap-tahap pelaksanaan kegiatan berdasarkan keadaan di masyarakat lokal. Kegiatan survey disertai wawancara dari anggota kelompok Muda Mengabdi dengan kelompok masyarakat luas memberikan kemungkinan serta sudut pandang yang baru bagi perencana dan pelaksana program.

Sebelum menentukan lokasi pengabdian, kelompok Muda Mengabdi telah memetakan beberapa nama-nama daerah dari berbagai kabupaten di Pulau Lombok yang memiliki permasalahan terkait Pekerja Migran Indonesia (PMI). Metode penentuan lokasi kegiatan didasarkan pada berbagai aspek diantaranya survey langsung kepada masyarakat, melakukan wawancara kepada masyarakat, serta diskusi-diskusi mendalam lainnya secara personal dengan target peserta yakni kelompok PMI.

Setelah melalui pertimbangan dan seleksi yang panjang, kelompok Muda Mengabdi akhirnya memilih Desa Tanak Beak, yang berlokasi di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat sebagai lokasi pengabdiannya. Penentuan tersebut tentu didasarkan pada berbagai faktor pendorong, diantaranya yaitu apabila ditinjau berdasarkan pembagian daerah kabupaten, Desa Tanak Beak termasuk sebagai salah satu desa yang sangat aktif dan berperan dalam menyumbang angka tertinggi dari pertumbuhan jumlah angka Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Pulau Lombok. Meskipun hasil survey yang telah dilaksanakan oleh kelompok Muda Mengabdi telah turut menyorot pada beberapa lokasi seperti di Desa Kebon Ayu di Gerung, Desa Sukerare di Lombok Tengah, hingga ke daerah Gunungsari di Lombok Barat turut menimbulkan berbagai permasalahan unik yang dimilikinya, kelompok Muda Mengabdi telah memantapkan pilihan pada Desa Tanak Beak tersebut.

2. Pelaksanaan Sosialisasi

Pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024, Tim Muda Mengabdi melaksanakan sosialisasi migrasi aman yang merupakan kegiatan inti dari program yang dirancang untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang proses migrasi yang benar dan aman. Kegiatan ini dilaksanakan dalam beberapa tahap yang terstruktur untuk memastikan peserta mendapatkan pemahaman yang menyeluruh.

Dengan pelaksanaan sosialisasi ini menjadi langkah awal yang penting dalam sosialisasi migrasi aman. Kegiatan ini dihadiri oleh warga desa dari setiap dusun, sehingga memastikan partisipasi yang luas dari masyarakat. Dalam sesi ini, tim Muda Mengabdi berkolaborasi dengan Dosen Hubungan Internasional Universitas Mataram Bapak Pamungkas Ayudaning Dewanto, S.Sos., M.A dan Badan Pelayanan Pelindungan Pekerja

Migran Indonesia (BP3MI) sebagai narasumber utama. Dengan memberikan informasi lengkap tentang langkah-langkah yang harus diikuti untuk menjadi PMI, termasuk persyaratan dokumen dan proses pendaftaran yang benar. Peserta diajak untuk memahami pentingnya menggunakan jalur resmi agar terhindar dari masalah hukum dan eksploitasi.

– **Sosialisasi Migrasi Aman Bagi Pekerja Migran Indonesia di Desa Tanak Beak Narmada**

- **Urgensi dan Dinamika Migrasi Internasional yang Aman**

Pada sesi pertama sosialisasi yang diisi oleh Dosen Hubungan Internasional Universitas Mataram Bapak Pamungkas Ayudaning Dewanto, S.Sos., M.A menjelaskan mengenai hak-hak yang dimiliki oleh pekerja migran, seperti hak atas upah yang adil, perlindungan kesehatan, dan akses terhadap layanan sosial di negara tujuan. Hal ini penting agar calon PMI tahu apa yang dapat mereka tuntut jika mengalami masalah saat bekerja di luar negeri dan juga menekankan risiko-risiko yang mungkin dihadapi oleh pekerja migran yang menggunakan jalur ilegal. Informasi tentang berbagai kasus yang pernah terjadi, seperti penipuan oleh oknum yang menawarkan pekerjaan, penting untuk memberikan gambaran jelas kepada peserta mengenai bahaya yang mengintai (Simamora, 2021).

Dalam sesi ini, peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan lebih spesifik terkait dengan pengalaman dan permasalahan yang mungkin mereka hadapi dalam proses migrasi. Diskusi ini membantu mengatasi keraguan dan kebingungan yang mungkin dimiliki oleh calon PMI. Mereka berbagi pengalaman dan perspektif mengenai tantangan yang dihadapi saat bekerja di luar negeri, serta bagaimana mereka berhasil melalui jalur resmi. Cerita nyata dari Purna-PMI menjadi inspirasi bagi peserta dan memberikan informasi praktis yang lebih relevan.



Gambar 1. Sosialisasi Migrasi Aman

- Simulasi Kasus

Tahap terakhir dari program sosialisasi adalah simulasi kasus, yang dirancang untuk menguji pemahaman peserta tentang prosedur migrasi dan situasi yang mungkin mereka hadapi. Peserta diajak untuk memecahkan

berbagai skenario yang berkaitan dengan proses pendaftaran dan situasi di negara tujuan, seperti berinteraksi dengan majikan, menghadapi masalah administratif, atau mendapatkan layanan kesehatan. Simulasi ini memberikan kesempatan bagi peserta untuk menerapkan pengetahuan yang telah mereka peroleh dalam situasi yang lebih realistis. Tujuan dari simulasi ini adalah untuk meningkatkan kesiapan calon PMI dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai prosedur yang benar, peserta diharapkan dapat mengurangi risiko yang dihadapi saat bekerja di luar negeri (Ardhanariswari et al., 2018).

- **Prosedur Legal, Jalur dan Proses Mobilisasi, serta Upaya Perlindungan PMI**

Pada sesi kedua, demi mewujudkan migrasi yang lebih aman bagi para PMI, Tim Muda Mengabdikan mengundang narasumber Badan Perlindungan Pekerja Migran (BP3MI) dengan tujuan sebagai jembatan bagi para kelompok pekerja migran untuk mendapatkan informasi yang lebih relevan, sebagai lembaga yang dibentuk untuk melindungi dan memberikan pelayanan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) baik sebelum, selama, maupun setelah mereka bekerja di luar negeri (BP2MI, n.d.). Lembaga ini berperan penting dalam pengelolaan dan tata kelola migrasi, dengan tujuan untuk mencegah masalah-masalah yang dihadapi oleh pekerja migran, seperti eksploitasi dan pelanggaran hak. BP3MI menyediakan berbagai layanan, termasuk edukasi tentang proses migrasi yang aman, pelatihan keterampilan, dan informasi mengenai hak-hak pekerja migran.

Sebagai mitra kunci dalam sosialisasi "Migrasi Aman," BP3MI memiliki peran strategis dalam menyebarkan informasi kepada calon PMI. Melalui sosialisasi ini, BP3MI berfungsi sebagai narasumber yang memberikan penjelasan mengenai prosedur legal, jalur dan proses mobilisasi, serta upaya perlindungan PMI. Penjelasan ini penting untuk memastikan bahwa calon pekerja migran memahami langkah-langkah yang harus diambil sebelum keberangkatan, termasuk persyaratan dokumen dan cara memilih perusahaan penempatan tenaga kerja yang legal dan terpercaya.

Dalam kegiatan sosialisasi, BP3MI menjelaskan pentingnya memilih jalur migrasi yang aman, serta risiko yang mungkin dihadapi jika memilih jalur ilegal. Mereka juga memberikan informasi mengenai perlindungan hukum yang tersedia bagi pekerja migran dan cara mengakses dukungan jika menghadapi masalah di negara tujuan. Selain itu, BP3MI berkolaborasi dengan berbagai lembaga terkait, seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, untuk memperluas jangkauan sosialisasi dan memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada peserta akurat dan komprehensif.

Manfaat dari sosialisasi ini tidak hanya dirasakan oleh calon pekerja migran, tetapi juga oleh keluarga dan masyarakat di sekitar mereka. Dengan adanya informasi yang jelas dan tepat mengenai migrasi, diharapkan masyarakat dapat mendukung anggota keluarganya dalam proses migrasi yang aman dan terhindar

dari risiko yang tidak perlu. Melalui kolaborasi yang baik antara BP3MI dan pihak-pihak terkait, sosialisasi "Migrasi Aman" dapat memberikan dampak positif dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi pekerja migran Indonesia. Berikut adalah penjabaran detail mengenai setiap tahap dari sosialisasi migrasi aman tersebut (Kharisma, 2023).



Gambar 2. Sosialisasi Migrasi Aman

3. Upaya Keberlanjutan Program Melalui Peran Kunci dari Pemerintah

Pemerintah Indonesia, melalui Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), telah merancang berbagai program untuk memfasilitasi mobilisasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara legal dan aman. Program-program ini dirancang untuk memberikan akses bagi warga Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri dengan jaminan perlindungan dan kepastian hukum. Setiap program memiliki alur, syarat, dan ketentuan yang spesifik, disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi yang berbeda-beda. Mengutip keterangan oleh Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani, "Terdapat 5 Skema Penempatan yang ditawarkan oleh BP2MI" ungkapnya pada saat rapat Koordinasi Penyelarasan Program Magang Luar Negeri di Kementerian Koordinator (Kemenko) Pembangunan Manusia dan Kemanusiaan (PMK) (BP2MI, 2024).

- **Skema G to G (Government to Government)**

Skema G TO G adalah program penempatan PMI yang dilakukan melalui kerjasama antar pemerintah. Dalam skema ini, pemerintah Indonesia bekerjasama langsung dengan pemerintah negara tujuan untuk menempatkan PMI. PMI dapat menikmati biaya yang lebih terjangkau tanpa perantara swasta, serta standar gaji dan fasilitas yang lebih baik. Selain itu, skema ini sering menyediakan peluang pengembangan keterampilan melalui pelatihan khusus sebelum penempatan, meningkatkan kualitas dan daya saing PMI di pasar kerja internasional. Saat ini, skema G to G telah bekerja sama dengan 3 negara penerima PMI, yaitu dengan negara Korea Selatan, Jepang, dan Jerman.

- **Skema Mandiri**

Skema Mandiri adalah program di mana PMI mencari dan mendapatkan pekerjaan di luar negeri atas inisiatif dan usaha sendiri, tanpa melalui agen atau perusahaan perekrutan. Dalam skema Mandiri, PMI menikmati fleksibilitas tinggi dalam memilih pekerjaan dan negara tujuan sesuai keinginan dan kemampuan mereka. PMI dapat membangun jaringan profesional yang lebih luas secara langsung dengan pemberi kerja di luar negeri, dan jika kinerjanya baik, mereka memiliki peluang lebih besar untuk menegosiasikan perpanjangan kontrak langsung.

- **Skema P to P (*Private to Private*)**

Skema P TO P melibatkan perusahaan penyalur tenaga kerja swasta yang telah mendapat izin dari pemerintah untuk merekrut dan menempatkan PMI ke perusahaan di luar negeri. Skema ini berpotensi membuka akses ke lebih banyak peluang kerja melalui jaringan luas perusahaan penyalur. PMI mendapatkan pendampingan profesional dan pelatihan pra-keberangkatan yang komprehensif. Selain itu, para calon PMI juga menerima bantuan dalam pengurusan dokumen dan persyaratan administratif lainnya. Dengan adanya jaminan penempatan, PMI memiliki kepastian kerja sesuai kualifikasi mereka.

- **Skema Untuk Keuntungan Perusahaan Sendiri (UKPS)**

UKPS merupakan skema penempatan PMI di mana perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja asing dapat langsung merekrut PMI secara mandiri, dengan persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh BP2MI. Skema ini berbeda dengan skema penempatan lainnya yang melibatkan pihak ketiga seperti agen penempatan tenaga kerja Indonesia (PPTKI). Dengan kata lain bahwa melalui skema penempatan UKPS, perusahaan dapat langsung memilih calon pekerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Skema UKPS membuka peluang kerja yang lebih luas, terutama untuk posisi-posisi yang membutuhkan keahlian khusus. Meskipun dilakukan secara mandiri, penempatan PMI melalui skema UKPS tetap berada di bawah pengawasan BP2MI, sehingga perlindungan terhadap hak-hak PMI tetap terjamin, memberikan keseimbangan antara fleksibilitas dan keamanan.

- **Skema G to P (*Government to Private*)**

Skema G TO P adalah program di mana pemerintah Indonesia bekerjasama dengan perusahaan swasta di luar negeri untuk penempatan PMI. Proses seleksi yang ketat menjamin kualitas PMI yang ditempatkan, didukung oleh perlindungan hukum yang kuat dari pemerintah Indonesia. Skema ini sering membuka akses ke perusahaan-perusahaan ternama di luar negeri, dengan standar kerja yang terjamin karena pemerintah dapat menegosiasikan kondisi yang lebih baik.

Setiap skema penempatan ini memiliki kelebihan dan tantangannya masing-masing. BP2MI berupaya untuk memberikan pilihan yang beragam agar calon PMI dapat memilih skema yang paling sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan aspirasi mereka. Dengan adanya variasi skema ini, diharapkan proses penempatan PMI dapat berjalan lebih efektif, aman, dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Penting bagi calon PMI untuk memahami dengan baik setiap skema tersebut sebelum menentukan

pilihan. Para calon PMI disarankan untuk berkonsultasi dengan pihak BP2MI atau BP3MI di setiap wilayah untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan bimbingan dalam memilih skema yang tepat. Program-program tersebut merupakan manifestasi konkret dari komitmen pemerintah Indonesia untuk memberikan akses yang lebih terjamin dan aman bagi warga negara yang ingin bekerja di luar negeri. Inisiatif ini lahir dari kesadaran pemerintah akan pentingnya perlindungan dan pemberdayaan PMI, yang tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan individu dan keluarga mereka, tetapi juga pada perekonomian nasional secara keseluruhan.

Potensi program-program ini juga dapat digunakan dalam meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional. PMI yang bekerja melalui jalur resmi dan memiliki keterampilan yang baik dapat mempromosikan budaya dan nilai-nilai Indonesia di negara tempat mereka bekerja. Hal ini dapat membantu membangun hubungan bilateral yang lebih kuat dan membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas antara Indonesia dan negara-negara tujuan PMI.

Agar dapat memberikan perlindungan yang menyeluruh, calon PMI harus melalui serangkaian pemeriksaan administrasi, kesehatan, dan keterampilan sebelum diizinkan berangkat. Proses ini melibatkan koordinasi antara BP2MI, Kementerian Ketenagakerjaan, dan instansi terkait lainnya untuk memastikan bahwa setiap calon PMI memenuhi standar yang ditetapkan.

4. Peran BP3MI Sebagai Pusat Layanan PMI di Lombok

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Nusa Tenggara Barat (NTB) memainkan peran krusial dalam mempermudah dan melindungi PMI yang berasal dari Lombok dan sekitarnya. Sebagai representasi BP2MI di tingkat provinsi, BP3MI NTB telah mengimplementasikan berbagai inisiatif dan program yang secara signifikan meningkatkan aksesibilitas, keamanan, dan kesejahteraan PMI asal Lombok. Seperti yang diungkapkan pada saat pemaparan materi dalam sosialisasi migrasi aman oleh Made Setyaningrum selaku narasumber dari perwakilan BP3MI NTB, "Saat ini, fenomena pekerja migran Indonesia telah menjadi isu yang semakin krusial dalam konteks pembangunan nasional." Beliau menekankan bahwa apabila potensi PMI tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan (Istiqomah et al., 2023).

Pertama, BP3MI NTB telah mendirikan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di beberapa titik strategis di Lombok. LTSA ini berfungsi sebagai pusat pelayanan yang mengintegrasikan berbagai layanan terkait PMI, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, hingga pengurusan dokumen. Misalnya, LTSA di Mataram tidak hanya melayani pengurusan paspor dan visa, tetapi juga menyediakan layanan konsultasi hukum dan pembekalan pra-keberangkatan (BP2MI, 2019). Melalui layanan yang tersedia tentu saja akan mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan calon PMI dalam mempersiapkan keberangkatan mereka, mengingat sebelumnya harus mengunjungi berbagai instansi yang terpisah. Kedua, BP3MI NTB telah mengembangkan program pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja di negara-negara tujuan populer bagi PMI

Lombok dengan melalui kerjasama dengan Balai Pelatihan Vokasi Produktifitas (BPVP) Lombok Timur untuk memberikan pelatihan bahasa, keterampilan teknis, dan pemahaman budaya. Sebagai contoh, karena tingginya peminat dan permintaan untuk pekerja dari Jepang dan Korea, BP3MI NTB dan BPVP menyelenggarakan kursus bahasa Jepang (Awaludin, 2023). Hal ini tidak hanya meningkatkan daya saing PMI Lombok di pasar tenaga kerja internasional, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja di negara tujuan. Ketiga, BP3MI NTB aktif dalam memfasilitasi penyelesaian kasus-kasus PMI bermasalah dengan tujuan untuk menangani kasus-kasus seperti kekerasan terhadap PMI atau kurangnya pemenuhan hak-hak yang tidak sesuai dengan kontrak (Wulandari & Dewi, 2023).

Melalui serangkaian inisiatif ini, BP3MI NTB telah secara signifikan mempermudah proses migrasi bagi PMI asal Lombok, sekaligus meningkatkan perlindungan dan prospek ekonomi mereka. Upaya-upaya ini tidak hanya berdampak positif pada individu PMI dan keluarga mereka, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial-ekonomi Lombok secara keseluruhan, mengubah narasi migrasi tenaga kerja dari sekedar 'pengiriman tenaga kerja' menjadi strategi pemberdayaan terhadap masyarakat yang berkelanjutan. Kolaborasi dengan pihak BP3MI dengan pelaksanaan sosialisasi dengan tema migrasi aman yang di inisiasi oleh Muda Mengabdi pada 14 Agustus 2024 diharapkan dapat meletakkan fondasi yang kuat untuk program serupa yang berfokus pada isu PMI di Desa Tanak Beak (Hamdi et al., 2023).

Simpulan dan Saran

Isu Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan telah menjadi perhatian penting di masa sekarang. Seiring dengan perkembangan serta kemudahan mobilisasi individu, turut memberikan peluang besar bagi para pekerja untuk dapat memperoleh kesempatan dalam memperoleh pekerjaan di luar negeri. Keberadaan dan peningkatan jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) setiap tahunnya tentu tidak jarang dihadapkan dengan berbagai permasalahan serta ancaman-ancaman baru yang dapat timbul. Beberapa ancaman tersebut salah satunya yakni maraknya jalur pemberangkatan pekerja ke luar negeri secara ilegal. Desa Tanak Beak sebagai pengirim PMI dengan salah satu jumlah yang tertinggi di Kabupaten Lombok Barat memiliki peran yang penting dalam mobilisasi pekerja lintas batas negara juga turut memerlukan perhatian yang lebih dari pihak-pihak pemerintah demi menghindari maraknya penggunaan jalur pemberangkatan yang ilegal. Kelompok Muda Mengabdi, yang mana dalam pengabdianya berfokus kepada peningkatan kesejahteraan PMI di Desa Tanak Beak, turut berkomitmen untuk membantu serta memfasilitasi kebutuhan masyarakat terutama berkaitan dengan PMI. Melalui pelaksanaan Sosialisasi Migrasi Aman, dengan menghadirkan narasumber dari Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), diharapkan mampu memberikan pengetahuan baru bagi masyarakat Desa Tanak Beak terutama kelompok PMI dalam memahami dampak buruk dari pemberangkatan ilegal, serta turut memperoleh pemahaman mengenai program-program pemberangkatan PMI yang bersifat resmi dari

pemerintah demi menghindarkan dampak buruk yang dapat mengancam keselamatan dan keamanan dari para Pekerja Migran Indonesia di desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhanariswari, R., Pamuji, K., & P., O. C. (2018). Peran Desa Sebagai Basis Migrasi Aman dalam Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 17(1), 37–46. <https://doi.org/10.31941/pj.v17i1.538>
- Awaludin. (2023). Puluhan calon PMI NTB ikut pelatihan bahasa Jepang-Korea secara gratis. *Antara News*.
- BP2MI. (2019). *LTSA Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Siap Melaksanakan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) Tahun 2020*.
- BP2MI. (2024). *Kepala BP2MI Sebut Magang Bukanlah Skema Penempatan Pekerja Migran Indonesia*.
- Febrianti, N. Z., & Afifah, W. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia yang Mengalami Kekerasan Di Luar Negeri. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 191–203. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.174>
- Hamdi, S., Syarifuddin, Oryza Pneumatica Inderasari, Lina Febriani, Nurul Haromain, Ikmal Maulana, & Ihfan Rahmawadi. (2023). Remitansi Pekerja Migran pada Masa Pandemi COVID-19 di Lombok Timur. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 18(2), 135–148. <https://doi.org/10.47441/jkp.v18i2.328>
- Istiqomah, I., Tarmudi, T., Yusuf, H., Dewi, R., & Umboh, N. K. (2023). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri. *Action Research Literate*, 7(10), 47–51. <https://doi.org/10.46799/ar.v7i10.181>
- Junaidi, M., & Khikmah, K. (2024). Perlindungan Hukum Dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Legal Protection and Placement of Indonesian Migrant Workers Abroad. *Jurnal USM Law Review*, 7(1), 490–501.
- Kharisma, D. B. (2023). Optimalisasi Pemerintah Desa dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. *Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(1), 77–85. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/1117%0Ahttps://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/download/1117/315>
- Simamora, H. J. (2021). Penerapan Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai Implementasi Good Governance Pengawasan Ketenagakerjaan. *Jurnal Widyaiswara Indonesia*, 2(3), 137–148. <https://doi.org/10.56259/jwi.v2i3.95>
- Widodo, H., & Belgradoputra, R. J. (2019). Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Binamulia Hukum*, 8(1), 107–116. <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.42>
- Wulandari, R., & Dewi, L. K. (2023). Perlindungan Pekerja Migran di Indonesia Menurut Perspektif Hukum dan HAM. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 26719–26724. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/10918%0Ahttps://jptam.org/index.php/jptam/article/download/10918/8679>